

Akui Staf Nakal

Hadi: Itu Cuma Kasus

PONTIANAK-Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Hadi Poernomo, mengungkapkan, jumlah pegawai di lembaga auditor ini mencapai lebih dari 5.000 orang di seluruh Indonesia.

Dari sekian banyak pegawai tersebut,

METRO HARI INI



Hadi tidak menampik kemungkinan adanya oknum BPK yang nakal.

"Kita harus bedakan kasus sama sistem. Pegawai BPK 5.600. Bisa saja ada yang nakal sehingga dia melakukan konspirasi. Tetapi itu kasus," katanya didampingi Kepala

Perwakilan BPK RI Kalbar, Adi Sudiby, kemarin. Menurut Hadi, selama ini BPK sudah memiliki sistem untuk pengawasan internal.

Sistem itu dirancang untuk mengantisipasi adanya oknum BPK yang nakal. Hanya saja, kadang-kadang sistem tidak dapat mencegah kemunculan kasus. "Orang yang

anaknyasepuluh saja kadang-kadang ada satu (yang nakal). Tetapi sistemnya sudah dibikin," jelas dia.

Pernyataan ini disampaikan menanggapi adanya kasus suap yang melibatkan

• ke halaman 15 kolom 3

Akui Staf Nakal

Sambungan dari halaman 9

oknum auditor BPK Jabar beberapa waktu lalu. Kasus suap tersebut menyangkut dua oknum auditor yang terbukti menerima uang dari Pemkot Bekasi untuk memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bekasi tahun 2009.

Terkait dengan pemeriksaan keuangan pemerintah daerah tahun 2010 di Kalbar, Hadi menampik anggapan bahwa pemeriksaan tersebut terkesan lamban. Sesuai aturan, menurutnya pemeriksaan BPK memiliki tenggat waktu tertentu yaitu dua bulan. Karena itu, cepat atau lambatnya proses audit juga tergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan keuangannya.

Khusus di Kalbar, sejauh ini terdapat satu kabupaten yang belum menyerahkan laporan keuangan yaitu Kabupaten Landak. BPK tidak mengetahui pasti kendala yang dihadapi

oleh pemerintah setempat. Namun, diduga hal ini karena di daerah tersebut sedang terjadi proses pergantian bupati. Sedangkan untuk kabupaten/kota lain, sampai sekarang proses audit sedang berjalan dan diharapkan dapat tuntas secepatnya.

Hadi juga menanggapi tentang banyaknya temuan atau indikasi pelanggaran dalam laporan keuangan pemerintah daerah di tahun-tahun lalu. Menurut dia, dalam melakukan audit, BPK selalu mengacu antara lain pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan aturan perundang-undangan. Indikasi pelanggaran bisa saja ditemukan saat pelaksanaan audit tersebut.

Temuan-temuan BPK biasanya menyangkut masalah aset. Ada kalanya pemerintah daerah tidak memiliki bukti atau dokumen terhadap kepemilikan aset. Bisa jadi pula temuan terjadi karena aset-aset pemda belum dilakukan penilaian. (rnl)